

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejak kemunculannya COVID-19 di awal tahun 2020 di Indonesia membawa dampak dan pengaruh besar khususnya pada sektor perekonomian, dimana melumpuhnya beberapa kegiatan ekonomi seperti produksi dan jasa, guna mengurangi rantai penyebaran. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa *social distancing*, *work from home*, dan menutup beberapa sektor ekonomi baik wisata, rumah makan, penginapan. Pandemi COVID-19 yang terjadi merupakan uji ketahanan suatu bangsa. Jawa Timur dikutip dari laman @JatimPemprov tercatat kasus kumulatif positif COVID-19 per September 2020 sebanyak 36.712 orang, dengan rincian sembuh 29.071 orang, meninggal 2.646 orang, dirawat 4.9995 orang, *suspect* 9.371 orang, dengan begini Jawa Timur memasuki zona merah dengan kasus terpapar COVID-19 terbesar diwilayah Jawa Timur, di Kota Kediri yang termasuk kota pelajar berdasarkan data melalui laman website pemerintah Kota Kediri <http://covid19.kedirikab.go.id/> terdapat kasus 2.713 orang dengan rincian pertambahan orang terpapar sebanyak 65 orang perhari, dan kasus terkonfirmasi sembuh sebanyak 589 orang, meninggal 46 orang dan dirawat 84 orang, hal ini menggambarkan bahwa Kota Kediri juga termasuk kedalam wilayah yang rentan terpapar virus COVID-19 dilihat terdapat sektor besar industri seperti Gudang Garam dan pabrik Gula serta kota pelajar dari kampung Inggris yang mana sebagian besar warganya dari luar kota hingga luar pulau, sehingga warga dari luar kota Kediri rentan membawa Virus COVID-19.

Dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi Pemerintah berupaya untuk merangkul dan menggandeng pelaku usaha yang jatuh terpuruk untuk bangkit. Walikota Kediri beserta jajaran Pemerintahannya mengambil langkah *preventif* agar tidak muncul *cluster* baru COVID-19, dengan menutup sementara tempat hiburan, wisata, penginapan sehingga hal ini sangat berdampak pada pelaku usaha yang bergantung pendapatannya pada sektor tersebut, selain itu tempat kursus dan sekolah-sekolah juga ditutup dan dapat dilakukan melalui daring atau *online*. Dalam menghadapi situasi seperti ini peran Pemerintah daerah dalam mengembalikan kondisi ekonomi yang tidak stabil pasca krisis yang disebabkan wabah penyakit atau pandemi berkepanjangan sudah seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakatnya agar hidupnya merasa aman tanpa ada kecemasan akan kelaparan dan kemiskinan yang meningkat karena dampak pandemi yang ditimbulkan.

Hal ini sesuai dengan konsep negara kesejahteraan atau *Welfare State* dimana pemerintahnya menjamin kesejahteraan masyarakatnya, dimasa pandemi jaminan kesehatan tidak cukup mengatasi masalah yang ada selain dalam dunia kesehatan peran ekonomi pun diperlukan. Dalam dunia ekonomi pemerintah daerah dengan kebijakan otonomi daerahnya membuat skenario dalam pemulihan ekonomi dari dampak pandemi yang terjadi. Program yang dibuat oleh Walikota Kediri ini juga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Prawansa. Gubernur Jawa Timur turut mengguyur program pemulihan ekonomi Kota Kediri dengan menggelontorkan bantuan kepada pelaku usaha UMKM. Bantuan yang diberikan berupa pembiayaan modal bagi UMKM, bantuan kredit

berupa program dana bergulir, KUR dan juga pemberian dana pemulihan ekonomi Nasional (PEN) sebagai wujud dukungan kepada program pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat. Selain, itu di Kota Kediri terdapat Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) dimana pengelolaan keuangannya juga dialokasikan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM Kota Kediri yang dianggarkan langsung oleh Wali Kota Kediri, Bapak Abu Bakar.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“PERPU”) disebutkan dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”): “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.” Penetapan PERPU yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Langkah ini diambil Pemerintah Kota Kediri dengan mengeluarkan Perwali No.16 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Hiburan dan Perdagangan dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2017 mengenai Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri. Dalam hal ini Pemerintah daerah memiliki skenario dalam proses *recovery* ekonomi masyarakat, dengan berbagai program yang telah disiapkan untuk para pelaku usaha ekonomi. Hal ini dilakukan juga untuk mempercepat gerak UMKM Kota Kediri dengan beralih dari pemasaran tradisional ke *modern* sesuai kondisi iklim ekonomi saat

ini yakni dilakukan dengan online atau pemasaran digital, dengan begitu dapat mendorong kegiatan ekonomi secara virtual, dan menyiapkan *platform* digital sebagai fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha ekonomi UMKM. Pemerintah Kota Kediri juga menyiapkan pameran *virtual* produk UMKM yang bekerja sama dengan *platform* besar Indonesia seperti Tokopedia dan juga menyediakan Mall UMKM untuk digunakan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Pada masa pandemi seperti ini peran pemerintah sangat mempengaruhi kelanjutan hidup suatu warganya serta keberlanjutan kondisi finansial daerahnya dalam menghadapi bencana tak terduga. Pemerintah wajib menjamin setiap masyarakatnya dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi namun masyarakat juga tidak boleh terus menerus berpangku tangan terhadap bantuan yang diberikan Pemerintah. Masyarakat juga harus belajar berkarya dan mandiri dalam tanggung jawab kehidupannya. Konsep ini sesuai seperti pada *Welfare State* atau negara kesejahteraan dimana Pemerintahnya menjamin kehidupan warganya, seperti di negara-negara Eropa yang telah melaksanakan konsep *Welfare State* dalam upaya melindungi warganya. Di Norwegia menerapkan sistem *Welfare State* pada bidang kesehatan Pemerintahnya menjamin masyarakat dalam hal kesehatan, di Indonesia beberapa program terwujud sesuai dengan konsep *Welfare State* seperti BPJS dan pada pandemi seperti ini Pemerintah Pusat mengeluarkan kartu pra kerja yang sangat membantu bagi warganya yang terdampak pandemi untuk bangkit kembali. Hal ini sesuai untuk menjamin kehidupan warganya dalam ekonomi ditengah krisis ekonomi karena pandemi. Menurut Barr (1998; dalam

Simarmata, 2008:18), pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara kesejahteraan haruslah berkorelasi dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Prinsip ini yang dijadikan dasar dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan.

Pemerintah Kota Kediri berupaya agar masyarakat dapat kembali hidup sejahtera tidak terpuruk oleh bencana pandemi berkepanjangan, Pemerintah menyiapkan antisipasi dan rencana untuk pemulihan ekonomi Kota Kediri dan pelaku ekonomi seperti UMKM dapat bergerak kembali. Berdasarkan Keputusan Presiden mengenai era normal baru, memasuki triwulan ke-tiga di tahun 2020 Kota Kediri mempersiapkan untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru dimana masyarakat harus siap menjalani kehidupan pola baru berdampingan dengan COVID-19 mengingat virus ini tidak tahu kapan akan berakhir. Beberapa bulan lumpuhnya ekonomi di Kota Kediri, dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri telah mempersiapkan pemulihan ekonomi di era adaptasi kebiasaan baru dengan menciptakan mall bagi UMKM yang ada di Kota Kediri, melalui pemberdayaan masyarakat yang sudah ada sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja berwujud ekonomi mandiri kreatif guna menanggulangi kemiskinan dan penyerapan lapangan kerja. Pemberdayaan masyarakat berbasis *Social Enablement* seringkali sulit dibedakan dengan *Social Empowerment* dan juga *Community Development* dimana masyarakat masih sering kali tumpang tindih dalam mengartikannya. Dalam jurnalnya *Enabling a Theory of Enablement: In Search for a Theory-Method Link*, (Valsiner, 2003)

mengungkapkan bahwa *Social enablement* sendiri merujuk pada pengertian bahwa strategi pemberdayaan sosial adalah tentang memanfaatkan minat dan persepsi pasar sehingga *brand* ataupun merek dari produk tersebut dapat dikembangkan yang merupakan suatu cara untuk mendorong kesadaran pasar, loyalitas dan perilaku membeli dengan hanya melibatkan penjual dan pembeli dalam ruang sosial digital dan saling berinteraksi.

Pada kajian ini pemulihan berbasis (*community based enablement*) dimaksudkan pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan Pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam memutuskan dan merencanakan serta mengelola sumberdaya yang dimiliki hingga masyarakat lokal memiliki kemampuan dan kemandirian ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Masyarakat lokal merupakan SDM suatu unsur esensial dan modal dasar dalam pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat merupakan motivasi dan dorongan dalam menggerakkan dan menggali potensi diri yang dimiliki agar dapat diasah dan dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas hidup layak. Berbagai cara yang dapat diupayakan seperti pendidikan dan pelatihan dasar ketrampilan untuk melatih kemampuan tiap individu. Melalui pemberdayaan, masyarakat dan berlatih dan bekerja sama serta saling bertukar ilmu pengetahuan dari kemampuan yang dimiliki untuk memberikan inovasi kreatif suatu produk. Menurut Wahyudi Kumorotomo (2007) dalam (Andriansyah, 2014) terkait dengan penelitiannya yang berjudul “Perubahan Paradigma Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM” merumuskan beberapa strategi pengembangan UMKM bahwa upaya pemberdayaan UMKM seharusnya diarahkan untuk mendukung

penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor. Arah kebijakan ini disertai dengan jiwa wirausaha baru berbasis teknologi dan berorientasi pada pemasaran yang meluas hingga ekspor.

Era revolusi industri 4.0 menuntut kehidupan masyarakat memanfaatkan teknologi dalam berbagai peranannya. Pada era digital menuntut adanya inovasi kreatif yang berkembang baik pengembangan produk dan jasa juga memperluas jaringan pemasaran melalui sarana online. Menurut (Gunartin, 2017) dalam (Yamani, Muhammad, and Faiz 2019:25) era globalisasi menuntut peningkatan inovasi produk dan jasa, pengembangan skill dari sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan perluasan area pemasaran. Hal ini sesuai dengan pengertian *Social Enablement* yang dimaksud dimana pemanfaatan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi menuju mandiri, kreatif dan inovatif definisi inilah yang dapat dimasukkan dalam konsep *Social Enablement*. Konsep *social enablement* sangat *familiar* dalam dunia medis khususnya dalam pemulihan dan perbaikan fisik maupun mental seseorang dengan menyesuaikan fase hidup yang baru, di dunia medis dalam jurnal *CAOT Position Statement: Occupations and health* (Thera-, 2009) *enablement* mengandung makna bahwa “*enablement is about helping people become more independent and improve their quality life*”.

Dalam Bidang Kesehatan *enablement* merupakan suatu konsep yang digunakan untuk terapi dan perawatan intensif yang tepat waktu dilakukan dirumah dimana untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dan berfokus untuk membentuk kemandirian seseorang dalam jangka panjang. Konsep tersebut sangat relevan dengan kondisi era baru yang dihadapkan oleh masyarakat guna

pemulihan kehidupan khususnya ekonomi yang sempat terpuruk karena pandemi Covid19. Pemberdayaan pada konsep “*enablement*” difokuskan pada memaksimalkan kemandirian, pilihan dan kualitas hidup masyarakat dalam kurun waktu yang panjang, dan dalam waktu yang bersamaan juga berusaha meminimalkan kebutuhan yang berkelanjutan. Melalui pencapaian tujuan ini, pemberdayaan berupaya untuk memberikan dukungan seumur hidup sehingga masyarakat dilatih untuk bergerak mandiri dengan menerapkan sumber daya pada tahap awal proses pemulihan pengguna layanan.

Pemberdayaan menyangkut cara yang fundamental bagi pemerintah menjalankan urusannya. Pada proses birokrasi hierarkis yang berdiri sendiri, dimediasi oleh politisi terpilih secara demokratis, memungkinkan pemerintah dalam perumusan, implementasi dan atau dari kebijakan program pemerintah melibatkan aktor lain yakni masyarakat. Sering kali dijumpai masyarakat membentuk organisasi maupun komunitas *Community Base Organization* (CBO) ditingkat lingkungan mereka untuk menanggapi kebutuhan lokal. Biasanya organisasi atau komunitas semacam CBO beroperasi secara *informal* dan berada di luar sistem pemerintah daerah tetapi berpotensi untuk menjadi mitra pemerintah daerah. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat (*social enablement*) merupakan pendamping dari penyelenggaraan pemerintahan. Itu berarti masyarakat turut andil bagian dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mata pencaharian mereka dan ikut serta terlibat dalam mengelola program untuk meningkatkan kondisi mata pencaharian dan pemukiman mereka sementara pemerintah memfasilitasi partisipasi dan pengelolaan masyarakat daripada mereka ikut

campur tangan secara langsung dan sepihak. Pemerintah harus memungkinkan masyarakat untuk mengambil tanggung jawab mereka sendiri dari inisiatif masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan pemerintah terhadap masyarakat dengan begitu dapat diartikan sebagai pemerintah (lokal) yang menciptakan kerangka hukum, administrasi, keuangan, dan perencanaan publik yang sesuai untuk memfasilitasi komunitas lingkungan untuk mengatur organisasinya, mengelola organisasi kedalam CBO guna mengelola urusan tingkat komunitas dan juga untuk melakukan aksi kolektif komunitas.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu Sumodiningrat dan Gunawan (2002); pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini maksudnya adalah mengenalkan kepada masyarakat bahwa setiap masyarakat memiliki keahlian dan kemampuan yang dapat diasah dan dikembangkan dengan pengetahuan *modern* masa kini. Karena tidak ada masyarakat yang tidak memiliki keahlian dan kemampuan dengan adanya pemberdayaan terdapat pembangunan keahlian, motivasi dan membangkitkan kemampuan untuk dikembangkan potensinya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam mencapai suatu keberhasilan dari pemberdayaan yang hendak dicapai perlu ada langkah-langkah positif dan nyata yang dilakukan secara langsung. Selain aksi nyata, penyediaan berbagai masukan (*input*) dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang untuk dapat mengembangkan potensi daya yang

dimiliki oleh masyarakat. Pada hakikatnya pemberdayaan tidak hanya dilakukan pada penguatan individu, masyarakat, melainkan pranata lainnya juga. Penanaman pola pikir *modern* perlu diadaptasikan kedalam kegiatan sehari-hari masyarakat yakni pola pikir bekerja keras, waktu adalah uang, menabung, investasi dan tanggung jawab sebagai bentuk upaya yang dilakukan dari penguatan pemberdayaan. Karena partisipasi dan kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah sangat penting dalam proses pembangunan yang berkelanjutan nantinya.

Ketiga memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam prosesnya pemberdayaan mengandung arti saling menguatkan dan melindungi serta menghindari adanya kesenjangan antara pihak kuat dan pihak yang lemah. Melindungi bukan berarti menutup diri dan mengisolasi interaksi karena hal itu akan membuat semakin mengkurcilkan diri, melindungi disini dalam arti melindungi dari adanya monopoli, mencegah persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi antara si kuat dan si lemah. Adanya pemberdayaan bukan berarti masyarakat menjadi bergantung akan adanya bantuan dan pemberian yang diberikan namun bentuk pelatihan kemandirian dalam mengambil keputusan dan usaha sendiri untuk mengembangkan potensi yang sudah dimiliki dengan bantuan dan fasilitas tersedia yang dapat dimanfaatkan.

Konsep *Enablement* bukanlah suatu konsep asing yang sering digunakan dalam proses pemulihan suatu kondisi tertentu. *Enablement* memang eksis di dunia kesehatan namun konsep ini dapat diambil ilmunya dalam menjadikan masyarakat

madani yang mandiri dan tidak bergantung pada Pemerintah terus menerus meskipun Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan warga nya. Di Indonesia sendiri penelitian dengan menggunakan konsep *enablement* masih sangat jarang cenderung belum ada dimana mencangkok kan konsep yang digunakan pada dunia medis kedalam lingkup pemerintahan bukanlah hal baru, seperti hal nya *reiventing government*. Hal inilah yang mendasari peneliti menuliskan sebuah penelitian dengan konsep *enablement* yang digunakan dalam pemulihan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang sudah ada sebelumnya. Dapat dilihat bahwa konsep ini dapat membantu proses pemulihan ekonomi dengan iklim saat ini yaitu era adaptasi kebiasaan baru yang mengharuskan semua kegiatan berbasis teknologi atau digital. UMKM yang sudah terbentuk ini dilatih dan dilakukan pendampingan secara berkala mengenai perubahan dalam mengenalkan produk dari UMKM.

Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 2008) Pasal 3 diatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,“maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu: a. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah”.

Menurut data statistik pada tahun 2018 tercatat bahwa UMKM di Indonesia berjumlah 64,19 juta UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 99% dari keseluruhan total usaha yang ada di Indonesia adalah para UMKM. UMKM ini memperkerjakan lebih dari 116 juta tenaga kerja atau sebesar 97% total tenaga kerja di sektor ekonomi. Di Kota Kediri berdasarkan data BPS Kota Kediri tercatat sejak tahun 2016 terdapat 39 ribu UMKM yang berjalan sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat lokal. UMKM menjadi prioritas dalam memperoleh modal kerja agar mampu kembali pulih dan produktif. Pemerintah mengalokasikan penanganan COVID-19 untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp.123,46 triliun, dan berharap masyarakat yang tergabung dalam ekosistem platform digital dapat mengakses dan memperolehnya.

Tabel 1.1 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kediri Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentasi koperasi aktif berkualitas	15,98	21,62	24,31	57,14	77,99
	Jumlah Koperasi aktif berkualitas	55	77	89	89	319
	Jumlah Koperasi aktif	344	356	366	378	409
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM tangguh	11.387	11.427	12.342	13.576	
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	15.837	15.837	16.517	16.788	
3.	Jumlah BPR/LKM Mandiri	10.343	10.343	11.417	12,641	
	Jumlah BPR/LKM	10.958	11.387	11.472	12.641	
4.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	29.306	29.306	31.383

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri

Kota Kediri diantara beberapa kabupaten merupakan wilayah administratif sempit dengan jumlah penduduk yang relatif kecil. Berdasarkan sumber data (BPS, 2014) yang tertuang dalam publikasi Kota Kediri dalam Angka 2020 hasil Sensus Penduduk 2019 Kota Kediri adalah 287.409 jiwa. Pada grafik indikator kesejahteraan Kota Kediri, terus mengalami upaya peningkatan beberapa tahun terakhir. Tercatat pada (BPS, 2014) dalam publikasinya Kota Kediri dalam Angka 2020 laju pertumbuhan PDRB Kota Kediri tahun 2019 menunjukkan angka 5,7 poin, berada pada laju pertumbuhan rata-rata kota/kabupaten di Jawa Timur. Untuk angka IPM Kota Kediri pada tahun 2019 tercatat relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain disekitarnya yakni sebesar 78,08 sedangkan pada Kabupaten lainnya terdapat di angka kisaran 70-78 poin. Namun, meski pada tahun 2019 Kota Kediri angka IPM masih berada dibawah Kota Blitar yakni 78,56 poin.

Tabel 1.2 Perbandingan Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (persen), 2015-2019

No.	Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kabupaten Nganjuk	5,18	5,29	5,26	5,39	5,36
2.	Kabupaten Tulungagung	4,99	5,02	5,08	5,21	5,32
3.	Kabupaten Blitar	5,06	5,08	5,07	5,10	5,12
4.	Kabupaten Kediri	4,88	5,02	4,90	5,08	5,07
5.	Kota Kediri	5,36	5,54	5,14	5,43	5,47
6.	Kota Blitar	5,68	5,76	5,78	5,83	5,84
Jawa Timur		5,44	5,57	5,46	5,50	5,52

Sumber: BPS Jawa Timur

Memiliki laju PDRB yang tinggi, Kota Kediri juga terdapat berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Masing-masing daerah yang ada di Kota Kediri memiliki potensi yang berbeda sehingga saling melengkapi kebutuhan antara daerah satu dengan yang lainnya. Sumber mata pencaharian utama selain pertanian terdapat juga Industri pengolahan yang menjadi pemasukan daerah. Dalam mengelola hasil pertanian tidak hanya diperjual kan dalam bentuk mentah, melalui UMKM yang dibentuk Pemerintah Kota Kediri hasil pertanian dapat diolah dalam bentuk lain yang juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar Kota Kediri maupun luar Kota. Terdapat beberapa UMKM yang mengelolah hasil tani maupun industri lokal seperti UMKM kerajinan, UMKM olahan makanan khas Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri membentuk UMKM sebagai pemberdayaan masyarakat lokal dengan harapan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat lokal dan juga menanggulangi angka kemiskinan.

Membangun kehidupan baru pasca bencana diperlukannya strategi. Untuk itu dibutuhkannya *social enablement* “ proses membangun dedikasi serta komitmen tinggi dari suatu organisasi dalam pencapaian tujuan”. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dan diberdayakan secara memadai dan dibarengi dengan motivasi. Hal ini lah yang mendasari Pemerintah Kota Kediri dalam upaya menggerakkan kembali UMKM yang telah ada untuk dikembangkan secara mandiri. Dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri berperan memfasilitasi dan mendukung penuh pelaku usaha UMKM, Walikota Kediri juga turut mempromosikan melalui jejaring sosial

instagram pribadi dan juga instagram Pemerintah Kota Kediri, menurutnya pengikut dilaman pribadinya dapat mengetahui produk UMKM yang ada di Kota Kediri melalui promosi *online* yang dilakukannya. Selain memanfaatkan laman akun media sosial Pemerintah Kota Kediri juga bekerja sama dengan platform besar seperti Tokopedia dan Shopee dalam melakukan promosi dan penjualan online agar masyarakat luar Kota Kediri dapat mengetahui sehingga diharapkan dapat membantu promosi. Pemerintah juga sudah menyiapkan mall digital bagi UMKM. Pada bulan September mall UMKM siap diluncurkan bekerja sama dengan *platform* tokopedia bertajuk “Mall UMKM Kediri Sale 2020”. Sejak peluncurannya masyarakat merasakan dampak langsung yaitu omzet yang meningkat dan bertambah peluncuran mall UMKM ini bersamaan dengan hari jadi Kota Kediri sehingga selain memperkenalkan Kota Kediri tidak hanya bangunan Simpang Lima Gumul yang menjadi *iconic* dan bangunan sejarah bekas kerajaan saja melainkan produk-produk unggulan UMKM kota kediri.

Pemerintah Kota Kediri berupaya meratakan pelatihan mall umkm ini hingga UMKM kecil rumahan. Sehingga dapat membantu masyarakat dari keterpurukan merosotnya ekonomi sebagai dampak adanya COVID-19. Pada *flash sale* tersebut masih beberapa UMKM yang memperkenalkan produknya pada mall UMKM karena belum meratanya pengetahuan digital masyarakat dalam proses transaksi maupun jual beli melalui *online*. Penjualan offline dirasa sangat sempit *market place* nya sehingga penjualan secara *online* menjadi solusi bagi pelaku UMKM. Pemerintah Kota Kediri akan berupaya melakukan pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat mengenai cara penjualan secara online, cara

membuat konten menarik sebagai media promosi pelatihan tersebut akan diajarkan secara berkala seperti seminar maupun kelas-kelas bersama para ahli dibidangnya dalam penjualan bisnis secara online dengan begitu masyarakat perlahan akan belajar dan mengerti. Namun, Pemerintah Kota Kediri juga menyadari masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan Mall UMKM Kota Kediri karena kegiatan ini akan berjalan lancar apabila masyarakat juga supportive sehingga memudahkan kerja Pemerintah dalam merealisasikan kegiatan tersebut sebagai upaya memberi dukungan kepada UMKM yang terdampak COVID-19. Tidak semua masyarakat memiliki *smartphone* dan gadget yang mumpuni.

Pemerintah Kota Kediri hingga saat ini berusaha mencari solusi terbaik dan melakukan pengembangan terus menerus guna masyarakat dapat tergabung ke Mall UMKM dan nantinya dapat bergerak secara mandiri. Dari pemaparan singkat yang telah dituliskan Pemerintah Kota Kediri berupaya membangkitkan dan menggerakkan kembali perekonomian daerah dengan mendukung penuh dan memfasilitasi masyarakat dalam memperbaiki roda perekonomian agar terus berjalan. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan yang belum terselesaikan dalam pemberdayaan sosial yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri di era normal baru dengan mengambil judul **“SOCIAL ENABLEMENT PADA PROSES PEMULIHAN EKONOMI UMKM ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA KEDIRI”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu,

1. Apakah langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri sudah menuju pada *Community Based Enablement* (CBE) sebagai solusi pemulihan sosial ekonomi masyarakat di era adaptasi baru?"
2. Apa tantangan bagi Pemerintah dan masyarakat UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi Prespektif *Community Based Enablement* (CBE)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri sudah menuju pada *Community Based Enablement* (CBE) sebagai solusi pemulihan sosial ekonomi masyarakat di era adaptasi baru di Kota Kediri dan
2. Untuk mengetahui tantangan Pemerintah dan Masyarakat UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi prespektif *Community Based Enablement* (CBE).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik bagi penulis maupun pihak lain. Terutaman untuk kalangan akademisi dan masyarakat umum yang perlu mengetahui analisis langkah maupun strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri sudah menuju pada *Community*

Based Enablement (CBE) sebagai solusi pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat era adaptasi baru di Kota Kediri.

1. Bagi Penulis

Penulis dapat memperdalam pengetahuan tentang pemberdayaan dalam prespektif *social enablement* dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Dan juga dapat menambah wawasan bagi peneliti.

2. Bagi Instansi Dinas Koperasi dan UMKM

Diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menentukan pola pemberdayaan dalam prespektif *social enablement* serta meningkatkan keakuratan data Pemerintah memberdayakan UMKM dalam prespektif *social enablement*.

3. Bagi Kampus

Hasil penelitian ini dapat menambah bacaan dan referensi di perpustakaan dan menjadi bahan literatur serta menambah referensi sejenis bagi peneliti lainnya di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dimasa yang akan mendatang.